

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN 4

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

2024

Jln. Sekartaji No. 2 Sumber Doko, Kec. Ngasem Kab. Kediri 64182

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN 4
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan 4 Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan 4 Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Laporan Kinerja Interim Triwulan 4 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan 4 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan 4 tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan Perjanjian Kinerja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Triwulan 4 Tahun 2024.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Interim Triwulan 4 Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan 4 tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan 4 terhadap target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan 4 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan 4 Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Kediri, 31 Desember 2024

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**



Dr. NUR MIPTAHUL FUAD, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19811203 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sekartaji Nomor 2 Ds. Doko Kec. Ngasem Telp. (0354) 682152
Email : diskominfo@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kodepos : 64182

BERITA ACARA
HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN 4
DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, 31 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan 4 sebagai berikut;

Pimpinan Rapat

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Peserta Rapat

1. Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Telah dilaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 4 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Laporan Interim Triwulan 4.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

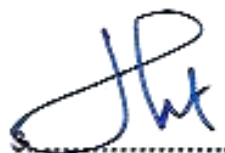
Yang Menyetujui Hasil Rapat :

- 1 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
- 2 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik/ Seksi 1
Sutarja, SE

1.

2.

3 Kepala Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi/ Seksi 2
Suwanto, S.Kom



4 Kepala Bidang Aplikasi Informatika/
Seksi 3
Achmad Sholeh Mustaqim, ST



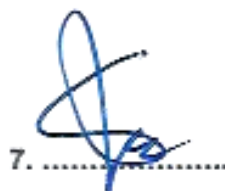
5 Kepala Bidang Statistik/ Seksi 4
Nadlirin, SH



6 Kepala Subbagian Keuangan/ Seksi 3
Yulia Puji Rahayu, SE



7 Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian/ Seksi 4
Sukma Fadly Nurlana, S.Kom



Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri



Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19811203 200604 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BERITA ACARA	iv
DAFTAR ISI	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Tugas dan Fungsi	1
1.4 Landasan Hukum	2
1.5 Isu-isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	5
3.1 Keandalan Data dan Pelaksanaan Aksi Kinerja	6
3.2 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Tahunan	8
3.3 Realisasi Anggaran dan Analisa Efisiensi	9
3.4 Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, Tanggapan Pimpinan, dan Rencana Tindak Lanjut	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	
SK PPID KABUPATEN	
SK HASIL MONEV PPID BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2023	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Triwulan 4 Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja Triwulan 4 tahun 2024.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja utama tambahan. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan 4	Realisasi Triwulan 4	Capaian Triwulan 4
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Presentase Kegiatan	100 % kegiatan untuk pemenuhan target Nilai Indeks PPID (84,53) Menuju Informatif	113,46 % Nilai Indeks PPID (95,91) Informatif	113,46 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

1.2.2 Alamat Organisasi : Jl. Sekartaji Nomor 2 Ds. Doko Kec. Ngasem

1.2.3 Struktur Organisasi :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris
- C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- D. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- E. Bidang Aplikasi Informatika
- F. Bidang Statistik
- G. Subbagian Keuangan
- H. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- I. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”

1.3.2 Misi

Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

1.3.3 Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

1.3.4 Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;

6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 TAHUN 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Nomor 188/2357/418.31/2021 tentang IKU masing-masing Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
9. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri.
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

1.5 Isu-isu Strategis

1. Meningkatnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2023	236	229	7
2	2022	165	146	19
3	2021	107	81	26
4	2020	101	100	1
5	2019	101	100	1

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami peningkatan. Sejumlah aplikasi berupa website SKPD telah dilaksanakan evaluasi pemeliharaan dan perbaikan secara intensif. Terdapat pengamanan yang tersertifikasi terhadap serangan siber pada aplikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Terdapat sejumlah pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2024 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga diperoleh Nilai SPBE tahun 2024 adalah 4,63 predikat Memuaskan.

2. Didukung pula tingkat pelayanan informasi komunikasi publik yang semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kategori PPID tahun 2024 yaitu 95,91 dengan kategori Informatif.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi Bupati Kediri tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter-Nasionalis, Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani “. Didukung oleh masing-masing OPD di Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kediri sebagai bentuk tanggung-jawab, dukungan terhadap visi pembangunan Kabupaten Kediri, dan optimalisasi kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan 4	Jenis Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Presentase Kegiatan	Menuju Informatif (84,53)	a. Menerima Keberatan Pemohon Informasi b. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi c. Mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memertanggung-jelaskan hasil kerjanya dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pertanggung-jelasan digunakan untuk memberikan transparansi atas kinerja yang telah dilakukan dan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja agar kinerja sesuai dengan lajur yang ditetapkan (*on the track*). Dalam hal ini, untuk mengukur kategori kinerja triwulan maka diukur dengan hasil capaian pada tabel sebagai berikut;

No	Capaian Triwulan	Kategori
1	>100%	Sangat Baik
2	80% - 100%	Baik
3	60% - 80%	Cukup Baik
4	<60%	Kurang Baik

Dalam bab ini akan digunakan cara untuk mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/ kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) pada tahun 2024. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perhitungan kinerja tersebut adalah sebagai berikut;

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target Triwulan 4	Realisasi Triwulan 4	Capaian Triwulan 4	Kategori Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	B (84,53)	Menuju Informatif (84,53)	Informatif (95,91)	113,46 %	Informatif

3.1 Keandalan Data dan Pelaksanaan Aksi Kinerja

Untuk menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, berikut disajikan model perhitungan atas formulasi hasil data kinerja, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1.1

Indikator	Formula	Perhitungan Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
Indeks Kategori PPID	(Nilai SAQ(30%)+ Nilai Visitasi(40%) +Nilai Wawancara dan Presentase Pimpinan Badan Publik(30%)) :3	(95,35+97+94,33):3	95,91 (Informatif)	KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 10 / SK / KI- Prov.Jatim / XI / 2024 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik disepakati dan ditetapkan Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% (enam puluh persen) dari nilai SAQ, 15% (lima belas persen) dari nilai verifikasi faktual/visitasi, dan 15% (lima belas persen) dari nilai wawancara/presentasi serta penilaian laporan tahunan badan publik yaitu 10% (sepuluh persen), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memperoleh nilai SAQ 95,35, nilai visitasi 97 dan nilai wawancara

dan presentasi Pimpinan Badan Publik atau yang mewakili 94,33, sehingga nilai total indeks PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri 95,91 dengan kategori Informatif.

Upaya untuk mengoptimalisasikan dan menguatkan peran PPID Kabupaten Kediri dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kediri, telah dilaksanakan berbagai macam aksi untuk mendukung capaian tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi.
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb.
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana.
4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID dan PPID Pelaksana.
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup Kabupaten Kediri.

3.2 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Tahunan

Dalam sub-bab ini disampaikan perbandingan kinerja triwulan dengan target tahunan. Perbandingan ini digunakan untuk mengukur apakah capaian triwulan sudah melewati target tahunan, sesuai dengan lajur perencanaan, atau masih berada dibawah lajur tahunan. Perbandingan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kinerja tahunan lanjutannya.

3.2.1 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama					
Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Triwulan 4	Target Tahunan	Hasil Perbandingan	Kategori Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Informatif (95,91)	Menuju Informatif (84,53)	Meningkat	Realisasi sama dengan Target Tahunan

3.2.1 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan Berikutnya

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target TW 1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Kategori Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Menuju Informatif (84,53)	Menuju Informatif (84,53)	Menuju Informatif (84,53)	Menuju Informatif (84,53)	Informatif (95,91)	Realisasi sama dengan Target Tahunan

Data diatas akan dijadikan dasar dalam perubahan target agar menjadi realistis dan *attainable*. Selain pada realisasi tadi, perubahan target juga merujuk pada penjelasan pada Sub-bab 3.2 yang dijelaskan menggunakan 4 Perspektif Balanced Scorecard, dimana terdapat hal-hal yang dapat menambah atau mengurangi upaya pencapaian target pada indikator-indikator diatas. Perubahan target akan dibubuhkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja perubahan.

3.3 Realisasi Anggaran dan Analisa Efisiensi

Pada sub-bab berikut ini disampaikan realisasi anggaran yang menunjang pencapaian kinerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada sub-bab ini akan dijelaskan realisasi anggaran sebagai penunjang capaian kinerja pada masing-masing sasaran. Penggunaan anggaran juga dianalisa efisiensi penggunaannya dengan mengukur pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran.

3.3.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan sebagai dasar anggaran-anggaran yang telah direalisasikan benar-benar menunjang pencapaian kinerja dan berdampak kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, realisasi anggaran yang ditampilkan dengan tujuan untuk menganalisa penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan Anggaran yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2024, maka disampaikan data realisasi anggaran sebagaimana berikut;

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran TW 4	Capaian Anggaran	Keterangan
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.704.798.00	2.807.514.912	36	
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	880.000	880.000	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.000	440.000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	440.000	440.000	100	

SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.085.841.600	1.384.481.303	27	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.181.600	869.558.152	27	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	879.500.000	194.241.666	29	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.840.000	42.840.000	25	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	440.000	440.000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	440.000	440.000	100	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	440.000	440.000	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000	55.250.000	54	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000	55.250.000	54	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.623.710.400	980.515.421	60	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.564.500	35.634.200	97	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.525.400	55.622.250	50	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.468.000	101.130.800	84	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.197.500	8.081.400	40	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.533.900	8.527.600	99	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.925.100	3.354.600	15	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.303.496.000	768.164.571	59	
Pengadaan Barang Milik Daerah	67.320.000	64.220.000	95	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	32.320.000	32.320.000	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	31.900.000	91	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.546.000	247.462.088	34	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.046.000	87.596.088	22	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.500.000	159.866.000	49	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.500.000	74.706.100	76	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.500.000	10.979.600	33	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.379.500	96	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	50.000.000	49.347.000	99	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	8.055.469.100	3.706.316.140	46	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.055.469.100	3.706.316.140	46	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	372.541.500	129.010.800	35	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	235.720.000	122.672.660	52	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.880.566.400	1.071.446.000	37	
Pelayanan Informasi Publik	157.108.000	115.181.280	73	
Layanan Hubungan Media	4.302.406.300	2.198.231.000	51	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	107.126.900	69.774.400	65	
Penguatan Kapasitas Sumber	0	0	0	

Daya Komunikasi Publik				
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0	
Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	
Program Aplikasi Informatika	5.187.306.000	2.842.582.339	55	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	0	0	

Kabupaten/Kota				
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.187.306.000	2.842.582.339	55	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0	0	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	0	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	
Pengembangan dan Pengelolaan	4.948.000.000	2.822.918.339	57	

Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	239.306.000	19.664.000	8	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0	0	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	599.139.700	320.412.520	53	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	599.139.700	320.412.520	53	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	308.651.900	144.711.820	47	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	260.539.800	151.998.500	58	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0	
Pembangunan	29.948.000	23.702.200	79	

Infrastruktur				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	719.000.000	117.303.012	16	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	719.000.000	117.303.012	16	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	719.000.000	117.303.012	16	

3.3.2 Analisa Efisiensi

Dalam upaya menghasilkan program pemerintahan berbasis kinerja, maka capaian anggaran perlu untuk diperbandingkan dengan capaian kinerja. Perbandingan tersebut selain untuk melihat efisiensi atau inefisiensi kinerja. Hal tersebut dimaksudkan sebagai analisa atas penggunaan anggaran yang digunakan benar-benar berfungsi untuk masyarakat. Selain itu pula, efisiensi juga mengisyaratkan manajemen tata kelola internal yang baik dalam sebuah OPD.

Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	Efisien
Perencanaan,	100	100	0	Efisien

penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	0	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	0	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	0	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	0	Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	0	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	0	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	0	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	100	0	Efisien
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	100	0	Efisien
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	0	Efisien

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	100	0	Efisien
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	0	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	0	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	0	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	0	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	0	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	0	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	0	Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	0	Efisien

Pengadaan Mebel	100	100	0	Efisien
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	0	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	0	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	0	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	0	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	96	4	Efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100	99	1	Efisien
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100	100	0	Efisien
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	Efisien

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	-
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100	100	0	Efisien
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	100	0	Efisien
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	100	0	Efisien
Pelayanan Informasi Publik	100	100	0	Efisien
Layanan Hubungan Media	100	100	0	Efisien
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100	100	0	Efisien
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	-
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-	-
Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	-
Program Aplikasi Informatika	100	100	0	Efisien

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	Efisien
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-	-
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	-	-	-	-

Pemerintah				
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	-	-
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100	100	0	Efisien
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	100	100	0	Efisien
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	100	0	Efisien
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	100	0	Efisien
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100	100	0	Efisien
Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	-	-	-

Pembangunan Infrastruktur	100	100	0	Efisien
<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	100	100	0	Efisien
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	Efisien
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100	100	0	Efisien

**3.4 ANALISA FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN, KEGAGALAN, TANGGAPAN PIMPINAN, DAN RENCANA TINDAK LANJUT
KINERJA INTERIM TRIWULAN 4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Triwulan 4	Kategori Kinerja	Penyebab Keberhasilan/ Faktor Penunjang	Penyebab Kegagalan/ Faktor Penghambat	Tanggapan Pimpinan	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	113,46 %	Menuju Informasi	Manajemen Internal: Instrumen Kebijakan Layanan Informasi	Manajemen Internal: Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website	Manajemen Internal: Perbaikan atas instrumen kebijakan layanan informasi	Manajemen Internal: Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD
				SDM: Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana	SDM: Kurangnya pemahaman para Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan	SDM: Peningkatan kapasitas Pejabat PPID	SDM: Pelaksanaan penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana melalui kegiatan Sosialisasi

					pelayanan informasi publik		
				Keuangan: Manajemen keuangan kegiatan PPID	Keuangan: Pengalokasian anggaran PPID kurang efektif dan efisien	Keuangan: Manajemen keuangan efektif dan efisien yang menunjang kegiatan PPID	Keuangan: Pengelolaan manajemen keuangan efektif dan efisien yang menunjang kegiatan PPID
				Masyarakat: Permintaan masyarakat atas layanan informasi di PPID	Masyarakat: Rendahnya permintaan masyarakat terhadap informasi di PPID	Masyarakat: Wawasan masyarakat atas manfaat informasi di PPID	Masyarakat: Melaksanakan edukasi kepada masyarakat atas manfaat informasi di PPID

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Interim Triwulan 4 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Triwulan 4 tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan triwulan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Triwulan 4 dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026 sudah efisien. Sedangkan Capaian kegiatan Triwulan 4 meningkat pada nilai 113,46 % jika dibandingkan dengan target awal tahun 2024 dengan nilai Menuju Informatif (84,53) dengan realisasi Triwulan 4 adalah 100 % mencapai nilai indeks PPID Informatif (95,91).

Kediri, 31 Desember 2024

**PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**



Dr. NUR MIPTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa penilaian berdasarkan sejauh mana badan publik di Jawa Timur dalam mengimplementasikan dan mematuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan publik yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi;
- e. bahwa Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% (enam puluh persen) dari nilai SAQ, 15% (lima belas persen) dari nilai verifikasi faktual/visitasi, dan 15% (lima belas persen) dari nilai wawancara/presentasi serta penilaian laporan tahunan badan publik yaitu 10% (sepuluh persen);

f. bahwa disepakati ...

- f. bahwa disepakati dan ditetapkan nilai monitoring dan evaluasi Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;
- g. bahwa disepakati dan ditetapkan badan publik di Jawa Timur kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif sebagaimana terlampir;
- h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a,b,c,d,e,f dan g perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 /BA/ KI-Prov.Jatim/X/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan nilai monitoring dan evaluasi di Jawa Timur Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan badan publik kategori Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, serta Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan BAWSLU Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif. Adapun badan publik dimaksud tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024
TANGGAL: 4 NOVEMBER 2024

NILAI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	RSUD DR SOETOMO	95	95	95	100	95,50	INFORMATIF
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	94.65	93.6	96.33	100	95,28	INFORMATIF
3	RSUD KARSA HUSADA	89.2	98.4	93.33	100	92,28	INFORMATIF
4	RSUD DR SOEDONO	83.5	97.5	95	100	88,98	MENUJU INFORMATIF
5	RS PARU MANGUHARJO	84.05	95.5	90	100	88,26	MENUJU INFORMATIF
6	RSUD DUNGUS	83.5	90.3	96.67	100	88,15	MENUJU INFORMATIF
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.1	87.6	94.67	100	87,80	MENUJU INFORMATIF
8	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	83.25	92.2	92.67	100	87,68	MENUJU INFORMATIF
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	85	81.6	94.33	100	87,39	MENUJU INFORMATIF
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	79.3	94.67	100	86,80	MENUJU INFORMATIF
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	88.4	85	100	86,71	MENUJU INFORMATIF
12	RUMAH SAKIT JIWA MENUR	84.8	50	91.67	100	82,13	MENUJU INFORMATIF
13	RSUD SUMBERGLAGAH	83	51.1	92.67	100	81,37	MENUJU INFORMATIF
14	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR	83.2	74.7	65	100	80,88	MENUJU INFORMATIF
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	80.2	27.6	93.33	100	76,26	CUKUP INFORMATIF
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR	78.7	0	0	100	57,22	KURANG INFORMATIF
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI	77.2	0	0	100	56,32	KURANG INFORMATIF
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR	75.35	0	0	100	55,21	KURANG INFORMATIF
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	73.4	0	0	100	54,04	KURANG INFORMATIF
20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	72.3	0	0	100	53,38	KURANG INFORMATIF
21	BAKORWIL BOJONEGORO	70.6	0	0	100	52,36	KURANG INFORMATIF
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR	68.4	0	0	100	51,04	KURANG INFORMATIF
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	66.35	0	0	100	49,81	KURANG INFORMATIF

24	RS PARU JEMBER	65.95	0	0	100	49.57	KURANG INFORMATIF
25	BAKORWIL MADIUN	60.6	0	0	100	46.36	KURANG INFORMATIF
26	RSUD DAHA HUSADA	60.05	0	0	100	46.03	KURANG INFORMATIF
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	58.6	0	0	100	45.16	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	58.3	0	0	100	44.98	KURANG INFORMATIF
29	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR	57.75	0	0	100	44.65	KURANG INFORMATIF
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR	57.2	0	0	100	44.32	KURANG INFORMATIF
31	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR	55.25	0	0	100	43.15	KURANG INFORMATIF
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR	53.65	0	0	100	42.19	KURANG INFORMATIF
33	RS MATA MASYARAKAT	51	0	0	100	40.6	KURANG INFORMATIF
34	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	50.75	0	0	100	40.45	KURANG INFORMATIF
35	RSUD HUSADA PRIMA	48.4	0	0	100	39.04	TIDAK INFORMATIF
36	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	46	0	0	100	37.6	TIDAK INFORMATIF
37	BAKORWIL JEMBER	41.85	0	0	100	35.11	TIDAK INFORMATIF
38	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	41.45	0	0	100	34.87	TIDAK INFORMATIF
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR	40.6	0	0	100	34.36	TIDAK INFORMATIF
40	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	39.4	0	0	100	33.64	TIDAK INFORMATIF
41	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	32.75	0	0	100	29.65	TIDAK INFORMATIF
42	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR	31	0	0	100	28.6	TIDAK INFORMATIF
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.4	0	0	100	27.04	TIDAK INFORMATIF
44	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.1	0	0	100	26.86	TIDAK INFORMATIF
45	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR	26.45	0	0	100	25.87	TIDAK INFORMATIF
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	26.3	0	0	100	25.78	TIDAK INFORMATIF
47	BAKORWIL PAMEKASAN	25.9	0	0	100	25.54	TIDAK INFORMATIF
48	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	25	0	0	100	25	TIDAK INFORMATIF
49	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	24.6	0	0	100	24.76	TIDAK INFORMATIF

50	BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR	21.55	0	0	100	22.93	TIDAK INFORMATIF
51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR	21.4	0	0	100	22.84	TIDAK INFORMATIF
52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	20.6	0	0	100	22.36	TIDAK INFORMATIF
53	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	19.8	0	0	100	21.88	TIDAK INFORMATIF
54	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	16.7	0	0	100	20.02	TIDAK INFORMATIF
55	RSUD MOHAMMAD NOER	15.55	0	0	100	19.33	TIDAK INFORMATIF
56	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR	30.55	0	0	0	18.33	TIDAK INFORMATIF
57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	13.8	0	0	100	18.28	TIDAK INFORMATIF
58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	10.85	0	0	100	16.51	TIDAK INFORMATIF
59	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	9.55	0	0	100	15.73	TIDAK INFORMATIF
60	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.7	0	0	100	14.02	TIDAK INFORMATIF
61	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.6	0	0	100	13.96	TIDAK INFORMATIF
62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	3.1	0	0	100	11.86	TIDAK INFORMATIF
63	BAKORWIL MALANG	0	0	0	100	10	TIDAK INFORMATIF
64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR	9.15	0	0	0	5.49	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	98.6	98	98	100	98,56	INFORMATIF
2	PEMERINTAH KOTA BLITAR	99.2	98.9	90	100	97, 86	INFORMATIF
3	PEMERINTAH KOTA MADIUN	96.6	99.7	96.67	100	97,42	INFORMATIF
4	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	96.2	98.4	91.67	100	96,23	INFORMATIF
5	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	97.7	91.6	91	100	96,01	INFORMATIF
6	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	95.35	97	94.33	100	95,91	INFORMATIF
7	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	95.3	90.4	93.33	100	94,74	INFORMATIF
8	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	93.2	92.4	94.67	100	93,98	INFORMATIF
9	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	93.3	95.1	90	100	93,75	INFORMATIF
10	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	93.1	92.5	93.33	100	93,73	INFORMATIF
11	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	91.6	95.2	95	100	93,49	INFORMATIF
12	PEMERINTAH KOTA BATU	90.7	96.9	89.67	100	92,40	INFORMATIF
13	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	93.5	82.1	91	100	92,07	INFORMATIF
14	PEMERINTAH KOTA MALANG	88.05	97	93.33	100	91,38	INFORMATIF
15	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	90.1	83.35	90	100	90,06	INFORMATIF
16	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	91.65	73.25	89.33	100	89,38	MENUJU INFORMATIF
17	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	83.1	92.7	90	100	87,27	MENUJU INFORMATIF
18	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	80.7	94.8	96.33	100	87,09	MENUJU INFORMATIF
19	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	81.5	90	88.33	100	85,65	MENUJU INFORMATIF
20	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	81.8	80.5	92	100	84,96	MENUJU INFORMATIF
21	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO	78.7	0	0	100	57.22	KURANG INFORMATIF
22	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	77.8	0	0	100	56.68	KURANG INFORMATIF
23	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	75.6	0	0	100	55.36	KURANG INFORMATIF
24	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	73.6	0	0	100	54.16	KURANG INFORMATIF
25	PEMERINTAH KOTA KEDIRI	64.65	0	0	100	48.79	KURANG INFORMATIF
26	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	64.6	0	0	100	48.76	KURANG INFORMATIF
27	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	63.4	0	0	100	48.04	KURANG INFORMATIF
28	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	62	0	0	100	47.2	KURANG INFORMATIF
29	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	59.9	0	0	100	45.94	KURANG INFORMATIF

30	PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN	53	0	0	100	41.8	KURANG INFORMATIF
31	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN	52.15	0	0	100	41.29	KURANG INFORMATIF
32	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	50.75	0	0	100	40.45	KURANG INFORMATIF
33	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	42.95	0	0	100	35.77	TIDAK INFORMATIF
34	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO	31.15	0	0	100	28.69	TIDAK INFORMATIF
35	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	24.55	0	0	100	24.73	TIDAK INFORMATIF
36	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	18.4	0	0	100	21.04	TIDAK INFORMATIF
37	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO	12.05	0	0	100	17.23	TIDAK INFORMATIF
38	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG	7.7	0	0	100	14.62	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI INSTANSI/LEMBAGA VERTIKAL DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	98.5	98.5	96.33	100	98,32	INFORMATIF
2	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR	81.45	98.6	94.67	100	87,86	MENUJU INFORMATIF
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM DI SURABAYA)	97.8	68.4	93.33	0	82,94	MENUJU INFORMATIF
4	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR	76.6	0	0	0	45.96	KURANG INFORMATIF
5	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR	28.9	0	0	100	27.34	TIDAK INFORMATIF
6	KANTOR SAR KELAS A SURABAYA	40.7	0	0	0	24.42	TIDAK INFORMATIF
7	BMKG STASIUN KLIMATOLOGI JAWA TIMUR	22.6	0	0	100	23.56	TIDAK INFORMATIF
8	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	36.65	0	0	0	21.99	TIDAK INFORMATIF
9	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	7.4	0	0	100	14.44	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH DESA (MANDIRI) DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH DESA LERAN KEC. MANYAR KABUPATEN GRESIK	99.5	100	95	98,70	INFORMATIF
2	PEMERINTAH DESA SIDOREJO KEC. ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG	98.5	99	94.33	97,77	INFORMATIF
3	PEMERINTAH DESA TEMPELWETAN KEC. LOCERET KABUPATEN NGANJUK	98.25	98.25	91.67	96,93	INFORMATIF
4	PEMERINTAH DESA KERKEP KEC. GURAH KABUPATEN KEDIRI	92.25	96.25	94.33	93,47	INFORMATIF
5	PEMERINTAH DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KABUPATEN PAMEKASAN	90.75	99.5	88.33	92,02	INFORMATIF
6	PEMERINTAH DESA REK KERREK KEC. PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN	84.4	99.25	91.33	88,76	MENUJU INFORMATIF
7	PEMERINTAHAN DESA KUNCIR KEC. NGETOS KABUPATEN NGANJUK	83.15	95.5	93	87,59	MENUJU INFORMATIF
8	PEMERINTAH DESA MERKAWANG KEC. TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN	84	92.25	91.67	87,18	MENUJU INFORMATIF
9	PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KEC. SILO KABUPATEN JEMBER	71.4	0	0	42.84	KURANG INFORMATIF
10	PEMERINTAHAN DESA BINANGUN KEC. SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN	66.8	0	0	40.08	KURANG INFORMATIF
11	PEMERINTAH DESA NGABAR KEC. JETIS KABUPATEN MOJOKERTO	65.55	0	0	39.33	TIDAK INFORMATIF
12	PEMERINTAH DESA KLATAKAN KEC. KENDIT KABUPATEN SITUBONDO	63.45	0	0	38.07	TIDAK INFORMATIF
13	PEMERINTAH DESA KEMIRIGEDE KEC. KESAMBEN KABUPATEN BLITAR	60.5	0	0	36.3	TIDAK INFORMATIF
14	PEMERINTAH DESA KUMITIR KEC. JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO	59	0	0	35.4	TIDAK INFORMATIF
15	PEMDES TUKUM KEC. TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG	44.3	0	0	26.58	TIDAK INFORMATIF
16	PEMERINTAH DESA PONTANG KEC. AMBULU KABUPATEN JEMBER	36.5	0	0	21.9	TIDAK INFORMATIF
17	PEMERINTAH DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN KABUPATEN MALANG	35.1	0	0	21.06	TIDAK INFORMATIF
18	PEMERINTAH DESA SUKOJATI KEC. BLIMBINGSARI BANYUWANGI	32.65	0	0	19.59	TIDAK INFORMATIF
19	PEMERINTAH DESA WONOREJO KEC. PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG	24.85	0	0	14.91	TIDAK INFORMATIF
20	PEMERINTAH DESA NGEMBOH KEC. UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK	21.7	0	0	13.02	TIDAK INFORMATIF
21	PEMERINTAH DESA GIRIPURNO KEC. BUMIAJI KOTA BATU	13.2	0	0	7.92	TIDAK INFORMATIF
22	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO KEC. GEMPOL KABUPATEN PASURUAN	10.6	0	0	6.36	TIDAK INFORMATIF
23	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH LAOK KEC. TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN	1.5	0	0	0.90	TIDAK INFORMATIF
24	PEMERINTAH DESA KEJAPANAN KEC. GEMPOL KAB PASURUAN	1.25	0	0	0.75	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER)	96.5	75	95	91.9	INFORMATIF
2	PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR	33.5	0	0	20.1	TIDAK INFORMATIF
3	PT JATIM GRHA UTAMA	25	0	0	15	TIDAK INFORMATIF
4	PT JAMKRIDA JATIM (PERSERODA)	20.5	0	0	12.3	TIDAK INFORMATIF
5	PT AIR BERSIH JATIM (PERSERODA)	13.5	0	0	8.1	TIDAK INFORMATIF
6	PT. KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM	3	0	0	1.8	TIDAK INFORMATIF
7	PT. GEDUNG EXPO WIRA JATIM	3	0	0	1.8	TIDAK INFORMATIF
8	PT CARMA WIRA JATIM	1.5	0	0	0.9	TIDAK INFORMATIF
9	PT MOYA KASRI WIRA JATIM	1.5	0	0	0.9	TIDAK INFORMATIF
10	PT LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
11	PT ADI GRAHA WIRA JATIM	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	KPU KAB. JOMBANG	99	99	88.33	100	97.50	INFORMATIF
2	KPU KAB. TRENGGALEK	81.5	13.8	80	100	72.97	CUKUP INFORMATIF
3	KPU KOTA BLITAR	66.5	0	0	100	49.9	KURANG INFORMATIF
4	KPU KAB. JEMBER	61.3	0	0	100	46.78	KURANG INFORMATIF
5	KPU KOTA MOJOKERTO	55.7	0	0	100	43.42	KURANG INFORMATIF
6	KPU KAB. KEDIRI	54.7	0	0	100	42.82	KURANG INFORMATIF
7	KPU KAB. GRESIK	36.9	0	0	100	32.14	TIDAK INFORMATIF
8	KPU KOTA BATU	36.1	0	0	100	31.66	TIDAK INFORMATIF
9	KPU KOTA PASURUAN	32.7	0	0	100	29.62	TIDAK INFORMATIF
10	KPU KAB. BOJONEGORO	30	0	0	100	28	TIDAK INFORMATIF
11	KPU KAB. BONDOWOSO	28	0	0	100	26.8	TIDAK INFORMATIF
12	KPU KAB. TULUNGAGUNG	26.1	0	0	100	25.66	TIDAK INFORMATIF
13	KPU KAB. LUMAJANG	24.9	0	0	100	24.94	TIDAK INFORMATIF
14	KPU KAB. TUBAN	24.3	0	0	100	24.58	TIDAK INFORMATIF
15	KPU KAB. NGANJUK	22.5	0	0	100	23.5	TIDAK INFORMATIF
16	KPU KAB. LAMONGAN	21.4	0	0	100	22.84	TIDAK INFORMATIF
17	KPU KOTA KEDIRI	18.6	0	0	100	21.16	TIDAK INFORMATIF
18	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	18.3	0	0	100	20.98	TIDAK INFORMATIF
19	KPU KAB. MOJOKERTO	11.95	0	0	100	17.17	TIDAK INFORMATIF
20	KPU KAB. MALANG	6.9	0	0	100	14.14	TIDAK INFORMATIF
21	KPU KAB. PAMEKASAN	6.5	0	0	100	13.9	TIDAK INFORMATIF
22	KPU KAB. SAMPANG	0.8	0	0	100	10.48	TIDAK INFORMATIF
23	KPU KAB. BANYUWANGI	0	0	0	100	10	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA


EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BAWASLU KABUPATEN TUBAN	81.8	80.7	88.33	100	84.43	MENUJU INFORMATIF
2	BAWASLU KABUPATEN JEMBER	80.6	52.2	80	100	78.19	CUKUP INFORMATIF
3	BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO	78.65	0	0	100	57.19	KURANG INFORMATIF
4	BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO	76.05	0	0	100	55.63	KURANG INFORMATIF
5	BAWASLU KOTA MADIUN	75.9	0	0	100	55.54	KURANG INFORMATIF
6	BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	71.4	0	0	100	52.84	KURANG INFORMATIF
7	BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	71.2	0	0	100	52.72	KURANG INFORMATIF
8	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	70.15	0	0	100	52.09	KURANG INFORMATIF
9	BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	69.6	0	0	100	51.76	KURANG INFORMATIF
10	BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO	69.55	0	0	100	51.73	KURANG INFORMATIF
11	BAWASLU KABUPATEN MALANG	69.1	0	0	100	51.46	KURANG INFORMATIF
12	BAWASLU KABUPATEN GRESIK	67.6	0	0	100	50.56	KURANG INFORMATIF
13	BAWASLU KOTA BATU	62.3	0	0	100	47.38	KURANG INFORMATIF
14	BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN	61.9	0	0	100	47.14	KURANG INFORMATIF
15	BAWASLU KABUPATEN JOMBANG	59.55	0	0	100	45.73	KURANG INFORMATIF
16	BAWASLU KABUPATEN KEDIRI	58.4	0	0	100	45.04	KURANG INFORMATIF
17	BAWASLU KABUPATEN PONOROGO	57.55	0	0	100	44.53	KURANG INFORMATIF
18	BAWASLU KOTA PASURUAN	55.3	0	0	100	43.18	KURANG INFORMATIF
19	BAWASLU KOTA SURABAYA	55	0	0	100	43	KURANG INFORMATIF
20	BAWASLU KABUPATEN MADIUN	53.75	0	0	100	42.25	KURANG INFORMATIF
21	BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG	52.7	0	0	100	41.62	KURANG INFORMATIF
22	BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO	52	0	0	100	41.2	KURANG INFORMATIF

23	BAWASLU KABUPATEN PASURUAN	51.9	0	0	100	41.14	KURANG INFORMATIF
24	BAWASLU KOTA KEDIRI	51.7	0	0	100	41.02	KURANG INFORMATIF
25	BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN	51.4	0	0	100	40.84	KURANG INFORMATIF
26	BAWASLU KABUPATEN MAGETAN	50.8	0	0	100	40.48	KURANG INFORMATIF
27	BAWASLU KOTA MALANG	49.95	0	0	100	39.97	TIDAK INFORMATIF
28	BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	47.6	0	0	100	38.56	TIDAK INFORMATIF
29	BAWASLU KABUPATEN BLITAR	43.7	0	0	100	36.22	TIDAK INFORMATIF
30	BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG	41.6	0	0	100	34.96	TIDAK INFORMATIF
31	BAWASLU KABUPATEN SUMENEP	38.1	0	0	100	32.86	TIDAK INFORMATIF
32	BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK	37.8	0	0	100	32.68	TIDAK INFORMATIF
33	BAWASLU KABUPATEN NGAWI	36.8	0	0	100	32.08	TIDAK INFORMATIF
34	BAWASLU KOTA BLITAR	36.7	0	0	100	32.02	TIDAK INFORMATIF
35	BAWASLU KABUPATEN PACITAN	34.5	0	0	100	30.7	TIDAK INFORMATIF
36	BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	28.95	0	0	100	27.37	TIDAK INFORMATIF
37	BAWASLU KOTA MOJOKERTO	22.55	0	0	100	23.53	TIDAK INFORMATIF
38	BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO	16.7	0	0	100	20.02	TIDAK INFORMATIF
39	BAWASLU KOTA PROBOLINGGO	15.6	0	0	100	19.36	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA


EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si